

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Indonesia sebagai negara berkembang gencar berusaha melakukan pembangunan disegala bidang dengan melibatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera diseluruh lini kehidupan tanpa terkecuali.

Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Secara garis besar dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System* (Mujiyati dan Aris, 2010:10). Dalam *Official Assesment System*, fiskus (pemerintah) berperan besar untuk keberhasilan pemungutan pajak, fiskus aktif mencari hingga menetapkan jumlah pajak terutang wajib pajak. Dalam *Self Assesment System* wajib pajak diberi kewenangan dan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku dari

menghitung sampai melaporkan pajak terutanganya. Dalam *With Holding System*, kewenangan pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam RAPBN-P 2013, pajak sangat berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk di dalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (Mujiyati dan Aris, 2010: 54).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui sistem *With Holding System* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Hal ini seperti yang diungkapkan Sadjarto (2008) bahwa di Indonesia pajak yang dipungut secara *With Holding* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan

memilih metode pemotongan PPh Pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Ruchjana, 2008).

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 (Gunarso, 2010) yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. *Net method* adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh perusahaan, *gross method* adalah metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menanggung adalah karyawan, sedangkan *gross-up method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan.

Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross-up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Besarnya tunjangan ditentukan dengan menggunakan rumus matematika tertentu. Tunjangan ini bersifat *taxable*, ditambahkan sebagai penghasilan bagi karyawan sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Apabila setelah dikurangi PPh 21 gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama besar dengan tunjangannya. Sementara bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan

merupakan *deductable expenses*, maka tidak akan terjadi koreksi fiskal positif yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Penelitian tentang penerapan metode *gross-up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan perusahaan belum banyak dilakukan oleh para pendahulu di lima tahun terakhir ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejenis yaitu menganalisis penerapan metode *gross-up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan suatu perusahaan, efek yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut kepada pihak terkait yaitu karyawan dan pemberi kerja (perusahaan).

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen yang merupakan BUMD milik Pemkab Kebumen, bergerak dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat yang tentunya tidak lepas dari kewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang para karyawan. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya perlu pertimbangan pemilihan alternatif metode pemotongan yang beban pajaknya paling efisien sehingga bisa memberi keuntungan kepada semua pihak.

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Metode *Gross-Up* dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen, dengan tujuan menganalisis penerapan metode *gross-up* untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PDAM Kabupaten Kebumen akan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan.

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen akan menguntungkan pihak perusahaan dan karyawan?.

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis penerapan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen akan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan dan karyawan.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Praktis**

Sebagai kontribusi sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang penerapan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang menguntungkan bagi pihak perusahaan dan karyawan.

2. Manfaat Empiris

Menambah pengetahuan dan wawasan utamanya bagi penulis dan para pembaca umumnya, bahwa ada tiga metode yang dapat diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21, salah satunya adalah metode *gross-up*. Diharapkan juga, dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.